



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769 );
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi:
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 /Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan kebutuhan tingkat Kecamatan.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan / atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan / atau peternakan.
9. Pesanggem adalah petani perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya tanaman pangan.
10. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan / atau udang.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
12. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
17. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
18. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
19. Bupati adalah Bupati Rembang.

## BAB II

### JENIS PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK

## BAB III

### PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani dan /atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam atau;
  - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan dari tingkat kecamatan ke tingkat Kabupaten Rembang.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang dan diketahui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut desa, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun Mantri Tani.

#### Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tingkat kecamatan dapat mengusulkan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

## Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan / atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan / atau kelompok tani di wilayahnya.

## BAB IV

### REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. realokasi antar Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
  - b. realokasi antar Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
  - c. realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti dengan realokasi antar Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau realokasi antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati / Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Apabila alokasi Pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB V

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai

petani, petambak dan / atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan / atau kelompok tani;
  - b. penyaluran pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan / atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan / atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani, petambak dan / atau kelompok tani dilakukan oleh petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi disetiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
  - (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per kg;
    - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per kg;
    - c. Pupuk ZA. : Rp. 1.400,- per kg;
    - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg;
    - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg;
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan /atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 : 50 kg;
  - c. Pupuk ZA. : 50 kg;
  - d. Pupuk NPK : 50 kg;
  - e. Pupuk Organik : 40 kg.

#### Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan :

#### **Pupuk Bersubsidi Pemerintah** **Barang Dalam Pengawasan**

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk



Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan / atau kelompok tani.

- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan /atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk KP3 Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh.

#### Pasal 15

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap sah dan diperhitungkan dalam kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 JENIS UREA**

**SATUAN : TON**

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	900	147,00	90,00	75,00	53,00	10,00	18,00	20,00	20,00	55,00	110,00	220,00	82,00
2	Kaliore	1.450	250,00	200,00	170,00	60,00	30,00	25,00	25,00	25,00	89,00	220,00	250,00	106,00
3	Sulang	1.400	300,00	150,00	60,00	60,00	55,00	50,00	50,00	40,00	90,00	115,00	300,00	130,00
4	Sumber	1.750	282,00	257,00	150,00	140,00	53,00	35,00	40,00	45,00	65,00	274,00	250,00	159,00
5	Bulu	2.200	350,00	330,00	130,00	90,00	90,00	70,00	85,00	90,00	105,00	300,00	370,00	190,00
6	Lasem	550	80,00	31,00	10,00	15,00	22,00	25,00	20,00	25,00	20,00	100,00	156,00	46,00
7	Pancur	1.300	242,00	200,00	140,00	55,00	35,00	30,00	30,00	35,00	30,00	170,00	210,00	123,00
8	Sluke	1.600	287,00	275,00	115,00	80,00	35,00	85,00	55,00	30,00	35,00	211,00	260,00	132,00
9	Kragan	1.800	370,00	180,00	94,00	61,00	73,00	93,00	80,00	45,00	50,00	275,00	346,00	133,00
10	Sarang	2.700	393,00	350,00	295,00	95,00	75,00	98,00	76,00	95,00	93,00	325,00	455,00	350,00
11	Sedan	2.300	394,00	280,00	239,00	80,00	77,00	74,00	45,00	52,00	80,00	291,00	448,00	240,00
12	Pamotan	1.500	350,00	150,00	35,00	25,00	35,00	53,00	62,00	70,00	105,00	125,00	310,00	180,00
13	Gunem	1.950	275,00	250,00	150,00	105,00	50,00	50,00	50,00	55,00	175,00	329,00	300,00	161,00
14	Sale	1.700	378,00	250,00	90,00	50,00	45,00	40,00	45,00	57,00	85,00	170,00	340,00	150,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.100</b>	<b>4.098,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>969,00</b>	<b>685,00</b>	<b>746,00</b>	<b>683,00</b>	<b>684,00</b>	<b>1.077,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>2.182,00</b>

Pj. BUPATI REMBANG

PEJABAT	PARAP
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	
STANSI / KANTOR	

SUKO MARDIONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 JENIS ZA**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	319	80,00	43,00	10,00	15,00	3,00	14,00	7,00	7,00	8,00	15,00	69,00	48,00
2	Kaliore	360	50,00	45,00	27,00	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	27,00	50,00	52,00	55,00
3	Sulang	1.200	234,00	70,00	25,00	76,00	50,00	55,00	18,00	22,00	57,00	155,00	306,00	132,00
4	Sumber	815	183,00	105,00	30,00	30,00	3,00	5,00	5,00	6,00	45,00	93,00	180,00	130,00
5	Bulu	735	180,00	79,00	84,00	66,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	45,00	151,00	75,00
6	Lasem	70	19,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	4,00	14,00	10,00
7	Pancur	500	85,00	35,00	53,00	75,00	3,00	25,00	15,00	27,00	33,00	5,00	102,00	42,00
8	Sluke	80	12,00	10,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	23,00	10,00
9	Kragan	575	135,00	90,00	25,00	27,00	20,00	12,00	10,00	11,00	10,00	85,00	104,00	46,00
10	Sarang	399	94,00	48,00	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	5,00	37,00	105,00	40,00
11	Sedan	475	106,00	75,00	54,00	7,00	10,00	9,00	3,00	6,00	6,00	56,00	95,00	48,00
12	Pamotan	1.600	441,00	134,00	25,00	30,00	65,00	30,00	25,00	70,00	70,00	190,00	370,00	150,00
13	Gunem	622	96,00	55,00	63,00	80,00	20,00	17,00	5,00	11,00	11,00	53,00	147,00	64,00
14	Sale	210	44,00	21,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	20,00	45,00	25,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.960</b>	<b>1759,00</b>	<b>813,00</b>	<b>432,00</b>	<b>452,00</b>	<b>220,00</b>	<b>208,00</b>	<b>124,00</b>	<b>196,00</b>	<b>307,00</b>	<b>811,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>875,00</b>

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

PRABAY	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
EA. BAH. HIN. V	
BADAN / Dinas /	
INSTANSI / Kantor	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 JENIS SP-36**

**SATUAN : TON**

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	150	26,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	50,00	24,00
2	Kalioti	151	45,00	17,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	28,00	16,00
3	Sulang	350	97,00	44,00	13,00	15,00	11,00	5,00	3,00	3,00	3,00	46,00	89,00	21,00
4	Sumber	302	50,00	34,00	16,00	5,00	5,00	7,00	5,00	7,00	10,00	34,00	83,00	46,00
5	Bulu	326	77,00	28,00	7,00	8,00	3,00	3,00	3,00	5,00	18,00	25,00	93,00	56,00
6	Lasem	85	32,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19,00	10,00
7	Pancur	245	80,00	15,00	3,00	3,00	3,00	10,00	3,00	3,00	3,00	10,00	87,00	25,00
8	Sluke	340	80,00	10,00	5,00	10,00	3,00	10,00	5,00	5,00	17,00	65,00	95,00	35,00
9	Kragan	375	85,00	45,00	10,00	6,00	20,00	12,00	8,00	5,00	5,00	20,00	90,00	69,00
10	Sarang	631	137,00	82,00	25,00	20,00	18,00	11,00	34,00	49,00	10,00	10,00	135,00	100,00
11	Sedan	565	121,00	45,00	15,00	3,00	20,00	15,00	6,00	53,00	62,00	45,00	132,00	48,00
12	Pamotan	250	87,00	15,00	5,00	5,00	10,00	5,00	3,00	5,00	7,00	10,00	76,00	22,00
13	Gunem	275	95,00	15,00	10,00	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	87,00	30,00
14	Sale	330	86,00	45,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	20,00	64,00	65,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.375</b>	<b>1098,00</b>	<b>410,00</b>	<b>134,00</b>	<b>102,00</b>	<b>125,00</b>	<b>98,00</b>	<b>95,00</b>	<b>160,00</b>	<b>156,00</b>	<b>302,00</b>	<b>1128,00</b>	<b>567,00</b>

<b>PURABAT</b>	<b>PARAF</b>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BADAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	

Pj. BUPATI REMBANG

*[Signature]*

SUKO MARDIONO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN,  
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 JENIS NPK**

**SATUAN : TON**

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mel	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	565	100,00	60,00	10,00	30,00	5,00	30,00	15,00	15,00	16,00	57,00	145,00	82,00
2	Kaliore	565	83,00	55,00	45,00	45,00	35,00	30,00	20,00	25,00	30,00	40,00	115,00	42,00
3	Sulang	824	202,00	62,00	60,00	55,00	75,00	54,00	21,00	23,00	46,00	64,00	100,00	62,00
4	Sumber	920	150,00	45,00	43,00	35,00	46,00	42,00	35,00	32,00	52,00	180,00	229,00	31,00
5	Bulu	1.010	197,00	125,00	50,00	25,00	30,00	25,00	38,00	31,00	45,00	115,00	221,00	108,00
6	Lasem	210	32,00	12,00	10,00	11,00	17,00	16,00	21,00	13,00	14,00	15,00	32,00	17,00
7	Pancur	705	140,00	84,00	25,00	25,00	20,00	35,00	25,00	25,00	30,00	40,00	170,00	86,00
8	Sluke	750	141,00	90,00	75,00	30,00	25,00	40,00	13,00	42,00	40,00	55,00	141,00	58,00
9	Kragan	1.140	225,00	90,00	60,00	32,00	52,00	73,00	38,00	35,00	44,00	95,00	246,00	150,00
10	Sarang	1.536	270,00	147,00	115,00	76,00	162,00	98,00	18,00	57,00	90,00	100,00	225,00	178,00
11	Sedan	1.205	250,00	100,00	40,00	40,00	45,00	52,00	25,00	40,00	25,00	178,00	240,00	170,00
12	Pamotan	1.200	290,00	157,00	30,00	25,00	33,00	32,00	35,00	45,00	50,00	100,00	251,00	152,00
13	Gunem	930	195,00	71,00	46,00	54,00	42,00	37,00	10,00	5,00	15,00	110,00	235,00	110,00
14	Sale	1.100	211,00	90,00	60,00	55,00	5,00	40,00	40,00	30,00	45,00	170,00	244,00	110,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.660</b>	<b>2486,00</b>	<b>1188,00</b>	<b>669,00</b>	<b>538,00</b>	<b>592,00</b>	<b>604,00</b>	<b>354,00</b>	<b>418,00</b>	<b>542,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>2.594,00</b>	<b>1356,00</b>

Pj. BUPATI REMBANG

PEJABAT PARAP  
 SERDA  
 ASISTEN I  
 BA. BAG. HUKUM  
 BADAN/DINAS /  
 INSTANSI / KANTOR

*(Handwritten signature)*

SUKO MARDIONO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

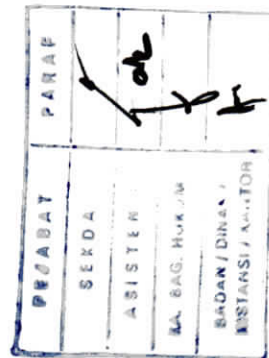
**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
 JENIS ORGANIK**

**SATUAN : TON**

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mel	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	250	80,00	15,00	8,00	5,00	3,00	12,00	5,00	5,00	3,00	5,00	89,00	20,00
2	Kalioti	230	56,00	15,00	15,00	10,00	8,00	10,00	3,00	3,00	3,00	10,00	77,00	20,00
3	Sulang	305	80,00	55,00	22,00	13,00	8,00	9,00	8,00	8,00	10,00	22,00	45,00	25,00
4	Sumber	475	53,00	20,00	25,00	24,00	50,00	50,00	55,00	45,00	40,00	30,00	70,00	13,00
5	Bulu	625	76,00	20,00	25,00	30,00	28,00	27,00	51,00	54,00	40,00	50,00	190,00	34,00
6	Lasem	110	18,00	3,00	5,00	7,00	8,00	6,00	8,00	5,00	6,00	6,00	26,00	12,00
7	Pancur	420	95,00	39,00	7,00	7,00	8,00	9,00	7,00	8,00	8,00	25,00	172,00	35,00
8	Sluke	615	93,00	30,00	40,00	35,00	30,00	35,00	25,00	32,00	28,00	75,00	150,00	42,00
9	Kragan	675	150,00	75,00	45,00	43,00	42,00	44,00	35,00	30,00	58,00	25,00	104,00	24,00
10	Sarang	750	178,00	80,00	16,00	18,00	22,00	17,00	22,00	20,00	20,00	83,00	183,00	91,00
11	Sedan	510	160,00	20,00	17,00	19,00	12,00	12,00	8,00	5,00	13,00	75,00	133,00	36,00
12	Pamotan	673	103,00	15,00	8,00	9,00	7,00	7,00	12,00	10,00	10,00	200,00	250,00	42,00
13	Gunem	332	77,00	34,00	12,00	13,00	9,00	8,00	15,00	13,00	5,00	30,00	86,00	30,00
14	Sale	610	155,00	50,00	47,00	17,00	16,00	30,00	35,00	30,00	30,00	25,00	150,00	25,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.580</b>	<b>1374,00</b>	<b>471,00</b>	<b>292,00</b>	<b>250,00</b>	<b>251,00</b>	<b>276,00</b>	<b>289,00</b>	<b>268,00</b>	<b>274,00</b>	<b>661,00</b>	<b>1725,00</b>	<b>449,00</b>

Pj. BUPATI REMBANG

**SUKO MARDIONO**




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 JENIS ZA**

**SATUAN : TON**

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	72	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	18,00	4,00
2	Kaliore	54	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	9,00
3	Sulang	150	43,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	26,00	48,00	18,00
4	Sumber	102	12,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	40,00	25,00
5	Bulu	94	20,00	10,00	8,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	20,00	8,00
6	Lasem	40	7,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	5,00
7	Pancur	62	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22,00	15,00
8	Sluke	63	15,00	8,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	5,00
9	Kragan	50	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	5,00
10	Sarang	80	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	25,00	10,00
11	Sedan	78	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	25,00	10,00
12	Pamotan	140	45,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	17,00	35,00	18,00
13	Gunem	55	18,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	5,00
14	Sale	60	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	5,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.100</b>	<b>288,00</b>	<b>85,00</b>	<b>41,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>151,00</b>	<b>308,00</b>	<b>142,00</b>

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
BA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	

Pj. BUPATI REMBANG

**SUKO MARDJONO**



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

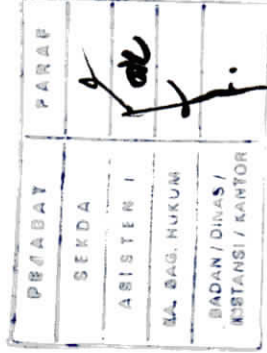
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 JENIS NPK**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	16,00	9,00
2	Kaliiori	50	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	5,00
3	Sulang	550	150,00	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	80,00	150,00	75,00
4	Sumber	204	34,00	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	35,00	15,00
5	Bulu	142	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00	30,00	22,00
6	Lasem	35	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00
7	Pancur	98	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00	13,00
8	Sluke	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00
9	Kragan	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	5,00
10	Sarang	97	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	32,00	20,00
11	Sedan	90	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	25,00	20,00
12	Pamatan	553	64,00	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	89,00	150,00	75,00
13	Gunem	77	20,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	25,00	5,00
14	Sale	70	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	25,00	5,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.100</b>	<b>438,00</b>	<b>172,00</b>	<b>150,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>324,00</b>	<b>553,00</b>	<b>278,00</b>

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 JENIS ORGANIK**

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	37	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	10,00
2	Kaliori	40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	10,00
3	Sulang	98	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	35,00	23,00
4	Sumber	67	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	25,00
5	Bulu	70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30,00	25,00
6	Lasem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pancur	50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00	15,00
8	Sluke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kragan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sarang	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sedan	59	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26,00	5,00
12	Pamotan	95	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	35,00	20,00
13	Gunem	41	11,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00	5,00
14	Sale	43	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22,00	10,00
	<b>Jumlah</b>	<b>600</b>	<b>110,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>80,00</b>	<b>228,00</b>	<b>148,00</b>

PEJABAT	PARAP
SERDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS /	
KORPORASI / KANTOR	

Pj. BUPATI REMBANG



**SUKO MARDIONO**